

LIBATKAN 12 TENAGA AHLI

# Pemerintah Resmi Bentuk Satgas TPPU

JAKARTA (KR) - Pemerintah secara resmi telah membentuk satuan tugas (satgas) untuk mensupervisi penanganan dan penyelesaian dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam transaksi janggal senilai Rp 349 triliun di Kementerian Keuangan. Pembentukan satgas tersebut sesuai hasil rapat Komite KNPP TPPU pada 10 April 2023.

Menko Polhukam yang juga Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan (KNPP) Mahfud MD mengatakan, pembentukan Satgas TPPU disampaikan kepada DPR RI melalui rapat dengar pendapat di Komisi III DPR RI sehari berselang. "Untuk itu saya sampaikan bahwa hari ini pemerintah telah membentuk satgas yang dimaksud," jelas Mahfud dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (3/5).

Menurutnya, satgas tersebut berfungsi melakukan supervisi dan evaluasi atas penanganan Laporan Hasil Analisis (LHA), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), dan informasi dugaan TPPU. Keberadaan Satgas TPPU tersebut, menurut Mahfud, terdiri atas tim

pengarah, tim pelaksana, dan kelompok kerja.

"Dan untuk tim pengarah terdiri dari tiga orang pimpinan Komite TPPU," kata Mahfud seraya menyebutkan, tiga orang pimpinan Komite KNPP TPPU adalah dirinya selaku Menko Polhukam dan Ketua Komite KNPP TPPU, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Wakil Ketua Komite KNPP TPPU, serta Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana selaku Sekretaris Komite KNPP TPPU.

Mahfud juga menyampaikan tentang tim pelaksana Satgas TPPU yang terdiri 10 orang dan diketuai Deputi III Bidang Koor-

dinasi Hukum dan HAM Kemenko Polhukam, Deputi V Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat sebagai wakil ketua, dan Direktur Analisis dan Pemeriksaan I PPATK sebagai sekretaris. Adapun untuk tujuh anggota tim pelaksana Satgas TPPU adalah Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Dirjen Bea Cukai Kemenkeu, Inspektur Jenderal, Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI, Wakil Kepala Bareskrim Polri, Deputi Bidang Kontra Intelijen Badan Intelijen Negara, serta Deputi Analisis dan Pemeriksaan PPATK.

"Satgas TPPU melibatkan 12 tenaga ahli. Mereka berasal dari bidang TPPU, korupsi, perekonomian, kepabeanan, cukai, dan perpajakan dalam melaksanakan tugasnya. Kendati demikian, ke-12 tenaga ahli itu tidak akan ikut dalam menangani dugaan TPPU karena bukan penyidik berdasarkan undang-undang yang berlaku. (Fu)-d

## STRATEGI JAGA STABILITAS EKONOMI ASEAN RI Dorong Penggunaan Mata Uang Lokal

JAKARTA (KR) - Indonesia sebagai Ketua ASEAN 2023 mendorong kerja sama penggunaan mata uang lokal dalam transaksi perdagangan secara bilateral atau Local Currency Transaction (LCT).

Kepala Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan RI Nella Sri Hendriyetti menyampaikan, Indonesia telah menetapkan beberapa upaya prioritas dalam mendorong stabilitas dan integrasi keuangan ASEAN. Salah satunya mendorong perluasan pemakaian mata uang lokal agar melibatkan semua negara Anggota ASEAN.

"Pemakaian mata uang lokal negara ASEAN akan memperkuat stabilitas mata uang masing-masing negara anggota dan

mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS. Hal ini akan menekan risiko ekonomi yang disebabkan oleh volatilitas nilai tukar negara-negara ASEAN terhadap dolar AS yang selama ini kita hadapi," ujarnya dalam Dialog Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) bertema Menjaga Stabilitas Ekonomi dan Netralitas ASEAN, di Jakarta, Rabu (3/5).

Langkah ini, lanjut Nella, merupakan strategi antisipasi untuk menjaga stabilitas ekonomi dan netralitas ASEAN di tengah tantangan perekonomian global dan konflik yang terus terjadi di dunia.

Menurut Nella Sri Hendriyetti, penggunaan mata uang lokal negara ASEAN diharapkan juga akan membuat keragaman dalam komposisi cadangan devisa. (Ati)-f

## KPK DALAMI KETERANGAN SAKSI

### Rafael Samarkan Transaksi Jual Beli Rumah

JAKARTA (KR) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan, tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi Rafael Alun Trisambodo (RAT) diduga telah menyamakan transaksi jual beli rumah. Hal itu terungkap setelah penyidik KPK memeriksa satu orang pihak swasta atas nama Hirawati pada Selasa (2/5).

Kehadiran saksi dalam pemeriksaan didalam pengetahuannya oleh penyidik. "Dalam hal ini antara lain terkait dengan dugaan adanya transaksi jual beli rumah yang disamakan oleh tersangka RAT dengan memanipulasi beberapa item transaksinya," jelas Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Jakarta, Rabu (3/5).

Diungkapkan Ali, awalnya KPK juga memanggil dua saksi lainnya pada Selasa. Namun kedua saksi dari pihak

swasta Jennawati dan Thio Ida tersebut mangkir dari panggilan penyidik. Selanjutnya, KPK akan menjadwalkan pemanggilan ulang terhadap keduanya.

"Kepada dua saksi yang tidak hadir, KPK ingatkan agar kooperatif hadir pada penjadwalan berikutnya," tuturnya.

Seperti diberitakan, KPK telah secara resmi menahan dan menetapkan Rafael Alun Trisambodo (RAT) sebagai tersangka pada 3 April 2023. Disebutkan, Rafael ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan menerima gratifikasi dari beberapa wajib pajak atas pengkondisian berbagai temuan pemeriksaan pajak.

KPK mengungkapkan, tersangka Rafael Alun diduga memiliki beberapa perusahaan. Salah satunya ialah PT Artha Mega Ekadhana (AME) yang bergerak dalam bidang jasa konsultasi terkait dengan pembukuan dan perpajakan. (Fu)-d

## WARGA BINAAN LP KHUSUS SENTUL

### 24 Eks Napiter Ikrar Setia NKRI

BOGOR (KR) - Sebanyak 24 warga binaan Napiter Tindak Pidana Terorisme (Napiter) Lembaga Pemasyarakatan (LP) Khusus Kelas IIB Sentul di Kawasan Pusat Pelatihan dan Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Sentul Bogor, Rabu (3/5), mengucapkan ikrar setia kepada NKRI. Kegiatan ikrar setia NKRI ini, merupakan bukti upaya negara meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan warga binaan pembersihan tindak pidana terorisme selepas kembali ke masyarakat.

"Ini merupakan bentuk usaha bangsa meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan mereka selepas kembali ke masyarakat. Selama berada di kawasan mitra de-

radikalisasi mereka dibekali ilmu kewirausahaan," ujar Kepala BNPT RI Komjen Pol Rycko Amelza Dahniel MSi.

Selain BNPT, ikrar setia kepada NKRI ini juga didukung Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dan Polri. Komjen Rycko berharap mo-

mentum ini menjadi titik balik warga binaan untuk tidak lagi menggunakan cara-cara yang menyimpang dan kembali setia kepada NKRI.

"Harapannya, mereka tidak lagi menggunakan cara-cara kekerasan yang tidak sesuai ideologi Pancasila, melepas baiat se-



Salah satu eks napiter mencium Merah Putih saat ikrar Setia Kepada NKRI.

## Bank BPD DIY Antarkan Omah Jamu Go Digital



Produk-produk hasil olahan kelompok Omah Jamu.



Suasana penjurian lomba.

YOGYA (KR) - Guna memperingati Hari Kartini Tahun 2023, Bank BPD DIY bekerjasama dengan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) DIY dan OJK DIY mengadakan 'Lomba Kelompok Usaha Wanita Go Digital'. Lomba ini disinergikan dengan program kerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) DIY Tahun 2023 guna mendukung pengembangan UMKM.

Kelompok Jati Husada Mulya atau yang sering disebut kelompok Omah Jamu yang berlokasi di Dusun Watu, desa Argomulyo Kapanewon Sedayu, Bantul, beranggotakan 45 pedagang jamu. Kelompok tersebut bergerak dalam bidang pengolahan tanaman herbal menjadi jamu, dan memfasilitasi ibu-ibu pedagang jamu keliling di wilayah Kapanewon Sedayu pada khususnya. Kelompok Omah

Jamu diajukan sebagai peserta lomba Kelompok Usaha Wanita Go Digital tingkat Provinsi DIY, menjadi perwakilan dari Kabupaten Bantul. "Lomba ini merupakan rangkaian peringatan Hari Kartini 2023. Lomba diinisiasi oleh Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) DIY berkolaborasi dengan PT Bank BPD DIY dan OJK," kata Yuna Pancawati, Kepala Biro Perekonomian dan SDA DIY di Yogyakarta, Rabu (3/5).

Menurut Yuna, kelompok didampingi oleh TPAKD Kabupaten Bantul yang bersinergi aktif dengan Bank BPD DIY Cabang Bantul khususnya Cabang Pembantu Sedayu. Kelompok Jati Husada Mulya memiliki banyak sekali jenis olahan jamu, yang diperdagangkan secara keliling oleh para ibu bakul jamu dan mengolah jamu bubuk instan yang dijual dalam kemasan dan telah memiliki pangsa pasar dari kunjungan wisata dan

pengiriman sampai keluar DIY. "Saat ini kelompok telah memanfaatkan akses digital berupa alat pembayaran Qris Bank BPD DIY, dan telah cukup aktif memanfaatkan so-



Rumah produksi kelompok omah jamu.

sial media berupa IG @omahjamuwatu, FB, aktif di WA story setiap anggota dan mulai aktif memanfaatkan marketplace Shopee.

Dalam kesempatan ini Bank BPD DIY sekaligus mensosialisasikan kredit murah yaitu KUR dan PEDE yang bisa diakses melalui aplikasi BPD DIY KU, web Sibakul dan kur.jogjaprovd.gov.id," terangnya.

Dalam kesempatan itu, Direktur Utama Bank BPD DIY, Santoso Rohmad mengungkapkan, upaya Bank BPD DIY untuk mendorong UMKM Perempuan Go Digitalisasi adalah bagian dari strategi untuk menekan adanya angka kemiskinan. Hal itu dilakukan karena ibu-ibu termasuk yang ada di pedesaan memiliki peran sangat sentral. Tidak hanya itu ibu-ibu dari kelompok wanita tani, wanita pengusaha juga didorong untuk maju.

"Bertepatan dengan momentum hari Kartini dipilih tema 'Kelompok Wanita bisa Go Digital'. Semua itu dilakukan agar bisa memberikan pengalaman maupun pembinaan terhadap mereka. Kare-

na dengan model digital seluruh aspek pemasaran dan transaksi bisa dilakukan dengan infrastruktur digital. Sehingga prosesnya bisa lebih cepat termasuk dalam

gotanya didominasi oleh Wanita dan telah mendapat pendampingan oleh Bank BPD DIY dan TPAKD tingkat Kabupaten dan Kota. Hal itu dilakukan karena di era transformasi digital terjadi perubahan kebiasaan masyarakat dalam bertransaksi, dari bertransaksi cash menjadi cashless. Oleh karenanya, guna mendorong UMKM dalam menghadapi persaingan di era digital khususnya Kelompok Usaha Wanita, perlu adanya komitmen bersama dari semua pihak untuk membentuk suatu ekosistem usaha. Hal ini diinisiasi dengan kerjasama antara TPAKD Provinsi / Kabupaten/Kota, Bank BPD DIY, Bank Indonesia dan OJK DIY untuk berkolaborasi menciptakan ekosistem digital bagi para pelaku usaha wanita.

"Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong pengembangan UMKM di DIY khususnya Kelompok Usaha Wanita. Menciptakan ekosistem usaha go digital. Selain itu juga membuka akses keuangan kepada berbagai lapisan masyarakat. Serta mengkampanyekan budaya transaksi non tunai kepada masyarakat. Dari situ diharapkan bisa meningkatkan pemahaman dan awareness masyarakat terhadap produk dan atau layanan jasa keuangan," paparnya.

Lebih lanjut Fera menambahkan, dalam kegiatan ini peserta lomba meliputi Kelompok Batik Rukma Seyegan Sleman Kelompok Batik Sekar Kinasih Patangpuluhan Kota Yogyakarta. Kelompok Pengolah dan Pemasaran (Poklahsar) Iwakku Lendah Kulonprogo, Kelompok Jati Husada Muda (omah Jamu) Argomulyo Sedayu Bantul dan Kelompok Batik Tulus (Turi Mulusan) Paliyan Gunungkidul. (Ria)

## AJAK PARPOL LAIN BERGABUNG

### Golkar - PKB Wacanakan Koalisi Besar

JAKARTA (KR) - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan partainya bersama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) akan menjalin komunikasi dengan partai-partai politik lain. Komunikasi ini dimaksudkan agar partai politik lain ikut bergabung dalam wacana pembentukan koalisi besar.

"Masing-masing akan terus bergerak dan berkomunikasi dengan partai lain agar masuk dalam koalisi besar," kata Airlangga usai melangsungkan pertemuan bersama Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar di Resto Plataran Senayan Jakarta, Rabu (3/5).

Menurutnya, Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR)



KR-Antara/Akbar Nugroho Gumay

Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto berbincang dengan Ketum PKB Muhaimin Iskandar.

sudah berbicara panjang lebar untuk membentuk koalisi besar. Namun diperlukan partai politik yang menjadi penggerak dari dua koalisi tersebut. Sehingga, Partai Golkar dan PKB bersepakat membangun koalisi inti sebagai motor penggerak

untuk menindaklanjuti wacana pembentukan koalisi besar.

"Jadi KIB-KKIR ini sudah berbicara panjang lebar, tinggi rendah, dalam, tetapi kita juga putusakan bahwa ini butuh core, butuh inti motor penggerak dan hari ini

dalam silaturahmi dan alhamdulillah kita akan dorong Golkar dan PKB menjadi koalisi intinya," ujarnya.

Airlangga menegaskan Partai Golkar yang bergabung dalam KIB bersama PPP dan PAN, sementara PKB tergabung dalam KKIR bersama Partai Gerindra akan menjadi jembatan kedua koalisi untuk melakukan komunikasi-komunikasi politik dengan parpol lain untuk merealisasikan pembentukan koalisi besar.

"Kemudian hari ini kita membuat jembatan antara KIB dan KKIR ini, jembatannya kokoh. Itu dengan Golkar dan PKB. Kokohnya jembatan ini tentunya akan terus melakukan lobi-lobi dan pembicaraan," katanya. (Ant/Has)-d

## KETERBATASAN TEMPAT PARKIR MALIOBORO Lahan Kosong dan Harga Tanah Kendala Utama

YOGYA (KR) - Keterbatasan lahan parkir di Kawasan Malioboro menjadi perhatian sejumlah pihak termasuk Pemda DIY. Keterbatasan lahan kosong dan harga tanah di kawasan tersebut yang tinggi menjadi persoalan utama.

Kondisi tersebut menjadikan pengadaan lahan kosong dengan luas sekitar 1 atau 2 hektare untuk digunakan sebagai tempat parkir sulit dilaksanakan.

"Kalau untuk melakukan pengadaan lahan parkir di Kawasan Malioboro tidak mudah. Karena selain sudah cukup padat, harga tanah di kawasan tersebut juga cukup tinggi, sehingga pengadaan lahan parkir jadi sulit. Untuk menyiasati keterbatasan lahan

parkir tersebut, Pemda DIY berupaya menyewa lahan eks Kampus UPN Veteran Yogyakarta yang kini menjadi Parkir Kemandan. Tempat parkir tersebut pun diharapkan mampu menampung wisatawan yang berkunjung ke sekitar Malioboro," kata Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X di Kepatihan, Yogyakarta, Rabu (3/5).

Sultan mengungkapkan, sejumlah upaya telah dilakukan Pemda DIY untuk memenuhi kebutuhan lahan parkir. Di antaranya dengan mengupayakan tempat parkir di Terminal Giwangan, Bandara Adisutjipto dan Terminal Jombor.

Adapun untuk mempermudah akses wisatawan dari tempat parkir tersebut ke Kota Yogya

bisa menggunakan semacam shuttle atau transportasi umum. Meski begitu, hasilnya belum bisa dikatakan optimal. Sebab kebanyakan wisatawan terpusat di Kawasan Malioboro.

Sementara itu mengenai adanya kenaikan tarif parkir legal mencapai lima kali lipat dan menjadi keluhan bagi wisatawan, Sultan menyatakan akan melakukan evaluasi. Pasalnya, pemberlakuan tarif parkir legal itu dinilai diikuti dengan tarif parkir yang ilegal.

"Memungkinkan seperti itu. Ruang itu untuk mencari duit lebih banyak bisa. Nanti kita pikirkan. Hanya masalahnya karena keterbatasan parkir, itu saja," ucapnya. (Ria)-d